

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 2004. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Kepegawaian Republik Indonesia*, 1979. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- HAW. Widjaja, *Percontohan Otonomi Daerah di Indonesia*, 1998. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- HAW. Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, 2011. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muchsan, *Hukum Kepegawaian*, 1982. Jakarta: Bina Aksara.
- Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, 2005. Bandung: Pusaka Setia
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, 2007. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Rozali Abdullah, *Hukum Kepegawaian*, 1986. Jakarta: Rajawali.
- Sedarmayanti, *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemimpinan yang Baik)*, 2009. Bandung: Refika Aditama.
- S.H. Sarundajang, *Pemerintahan Daerah Di Berbagai Negara*, 2005. Jakarta: Kata Hasta Pustaka.
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, 2008. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 1984. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Sri Hartini, Setiajeng Kadarsih, dan Tedi Sudrajat, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, 2008. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, 2012. Bandung: CV. Alfabeta.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 2003. Jakarta: Sinar Grafika.

## B. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100/4675/SJ Tentang Pemberdayaan Kapasitas Staf Ahli Kepala Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 52 Tahun 2008 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Staf Ahli Gubernur

## C. Kamus

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1990. Jakarta: Balai Pustaka.

## D. Media Cetak

Padang Ekspres, *Seleksi Terbuka Terbatas Mengisi Posisi Enam Penjabat Bupati*, 31 Agustus 2015

Padang Ekspres, *Penghargaan Atas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat*, 17 Desember 2015

Singgalang, *Pelantikan Plh Bupati Pasaman*, 31 Agustus 2015



## E. Website

<http://www.kemendagri.go.id/news/2015/12/16/sekjen-minta-staf-ahli-dukung-tugas-kepala-daerah>

[http://www.luwutimurkab.go.id/lutim3/index.php?option=com\\_content&view=article&id=1618:-kemedagri--staf-ahli-harus-ahli--dari-rakernas-staf-ahli-di-manado&catid=78](http://www.luwutimurkab.go.id/lutim3/index.php?option=com_content&view=article&id=1618:-kemedagri--staf-ahli-harus-ahli--dari-rakernas-staf-ahli-di-manado&catid=78)

<https://docs.google.com/document/d/1zXt-TWRaETo9IF3wByCArmui7UCnpgaBZcPR5daiJEY/edit?pli=1>

